



Journal of Human And Education

Volume 6 No. 3, Tahun 2026, pp 22-31

E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876

Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Pengelolaan Kebersihan Masjid Berbasis Komunitas Melalui Pendekatan Participatory Action Research Di Masjid Jami' Babussalam Desa Darussalam

Rizky Nur Fadilah¹, Elismayanti Rambe²

¹STAIN MADINA

²STAIN MADINA

Email: rizkyfadhilah502@gmail.com, elismayantirambe@stain-madina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan kebersihan Masjid Jami' Babussalam melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Kondisi awal masjid menunjukkan belum adanya sistem pengelolaan kebersihan yang terorganisasi: kegiatan bersih-bersih hanya dilakukan secara insidental, tidak terdapat jadwal piket, pembagian tugas, maupun penyimpanan peralatan yang memadai. Penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan siklus PAR, yaitu observasi lapangan, musyawarah partisipatif bersama pengurus BKM, pemuda, dan tokoh masyarakat, pelaksanaan aksi gotong royong, serta refleksi bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar persoalan kebersihan masjid bukan terletak pada rendahnya kesadaran warga, melainkan pada ketiadaan mekanisme tanggung jawab kolektif yang terstruktur. Proses musyawarah partisipatif berhasil mengidentifikasi masalah secara bersama dan melahirkan komitmen aksi nyata, sementara kegiatan gotong royong membuktikan bahwa partisipasi aktif termasuk inisiatif spontan dari kalangan remaja dapat muncul ketika masyarakat memiliki kejelasan peran dan keterlibatan sejak tahap perencanaan. Refleksi bersama menghasilkan sejumlah keputusan kelembagaan, meliputi pembentukan Tim Kebersihan Masjid, penyusunan jadwal piket bergiliran, penetapan Program Jumat Bersih sebagai kegiatan rutin, serta mekanisme evaluasi bulanan oleh BKM. Temuan ini mengonfirmasi bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan membutuhkan pelebagaan mekanisme kolektif, bukan sekadar mobilisasi sesaat, dan bahwa pendekatan PAR efektif dalam mendorong komunitas bergerak dari ketergantungan pada inisiatif individual menuju sistem tanggung jawab bersama yang terorganisasi dan proaktif.

Kata kunci : *Kebersihan Masjid, Participatory Action Research, Gotong Royong, Partisipasi Masyarakat, Pelebagaan.*

Abstract

This study aims to describe the process of cleanliness management at Masjid Jami' Babussalam through a Participatory Action Research (PAR) approach. Initial observations revealed the absence of an organized cleanliness management system: cleaning activities were carried out only incidentally, with no scheduled duty rosters, task distribution, or adequate storage of cleaning equipment. The research was conducted through four stages of the PAR cycle, namely field observation, participatory deliberation involving BKM administrators, youth representatives, and community leaders, collective action through a communal cleaning activity, and shared reflection. The findings indicate that the root cause of the mosque's cleanliness issues lay not in a lack of community awareness, but in the absence of a structured collective responsibility mechanism. The participatory deliberation process successfully facilitated collaborative problem identification and generated genuine commitment to action, while the communal cleaning activity demonstrated that active participation including spontaneous initiative from youth members can emerge when community members have clearly defined roles and are involved from the planning stage. Shared reflection produced several institutional decisions, including the establishment of a Mosque Cleanliness Team, the creation of a rotating duty schedule, the designation of the Friday Clean Program as a regular monthly activity, and a monthly evaluation mechanism overseen by the BKM. These findings confirm that sustainable social change requires the institutionalization of collective mechanisms rather than mere momentary mobilization, and that the PAR approach is effective in enabling communities to transition from dependence on reactive individual initiative toward an organized and proactive system of shared responsibility.

Keywords: Mosque Cleanliness, Participatory Action Research, Communal Cooperation, Community Participation, Institutionalization.

PENDAHULUAN

Masjid dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual semata, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial, pendidikan, dan pengorganisasian komunitas Muslim. Fungsi ganda ini menjadikan masjid sebagai salah satu institusi komunal yang paling strategis dalam masyarakat Muslim, khususnya di wilayah perdesaan di mana masjid sering kali menjadi satu-satunya ruang publik yang digunakan secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Samwil et al. (2024) menegaskan bahwa masjid sesungguhnya berfungsi sebagai institusi pendidikan, interaksi sosial, dan pusat pemberdayaan komunitas, namun pada kenyataannya banyak masjid yang hanya berperan sebagai "menara gading" yang terbatas pada fungsi ritual keagamaan semata. Dalam konteks tersebut, kondisi fisik masjid termasuk kebersihan dan keteraturannya bukan sekadar persoalan estetika, melainkan mencerminkan kualitas pengelolaan komunitas secara keseluruhan. Masjid yang bersih dan terawat tidak hanya mendukung kekhusyukan ibadah, tetapi juga memperkuat identitas kolektif dan rasa memiliki warga terhadap ruang bersama mereka.

Namun demikian, realitas yang ditemukan di lapangan sering kali berbeda dari idealitas tersebut. Banyak masjid di wilayah perdesaan menghadapi persoalan kebersihan dan pemeliharaan yang tidak terselesaikan secara sistematis. Persoalan ini umumnya bukan disebabkan oleh minimnya kepedulian warga, melainkan oleh ketiadaan sistem pengelolaan yang terorganisasi: tidak ada pembagian tanggung jawab yang jelas,

tidak ada jadwal yang disepakati bersama, dan tidak ada mekanisme evaluasi yang memastikan keberlangsungan kegiatan pemeliharaan. Kondisi demikian menempatkan kebersihan masjid dalam situasi yang bergantung sepenuhnya pada inisiatif individual yang bersifat reaktif, sehingga rentan terhadap ketidakkonsistenan dan pengabaian dalam jangka panjang. Santoso *et al.* (2025) dalam penelitiannya tentang program eco-mosque menemukan bahwa pelibatan aktif pengurus dan remaja masjid dalam program lingkungan secara signifikan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian fasilitas ibadah, sebuah temuan yang mengonfirmasi bahwa persoalan pemeliharaan masjid lebih sering berakar pada lemahnya struktur organisasi daripada pada rendahnya kesadaran moral warganya.

Kajian tentang pengelolaan masjid dan pendekatan Participatory Action Research (PAR) masing-masing telah berkembang cukup luas dalam literatur akademis. Di satu sisi, penelitian tentang modal sosial komunitas menunjukkan bahwa jaringan kepercayaan, norma kolektif, dan keterlibatan bersama merupakan fondasi penting bagi terwujudnya tindakan kolektif yang efektif. Auliah *et al.* (2025) menemukan bahwa modal sosial yang diwujudkan melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan norma bersama memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap tindakan kolektif komunitas, dan bahwa program yang lahir dari inisiatif komunitas terbukti lebih efektif dibandingkan program yang digagas dari luar. Temuan ini relevan dengan kondisi pengelolaan masjid, di mana kepedulian warga yang sesungguhnya ada tidak dapat terwujud menjadi tindakan nyata tanpa kehadiran mekanisme organisasional yang memfasilitasinya. Di sisi lain, dalam ranah metodologi penelitian sosial, PAR telah diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk menangani persoalan komunitas yang berakar pada dinamika sosial dan kelembagaan. Snapp *et al.* (2023) menegaskan bahwa yang membedakan PAR dari pendekatan penelitian lainnya adalah sentralitas komunitas dalam menetapkan agenda penelitian, menginterpretasikan hasil, dan mendorong perubahan yang kontekstual dan berkelanjutan. Kemmis dan McTaggart (2005) sebelumnya juga telah menekankan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat dilibatkan secara penuh sejak tahap identifikasi masalah, karena keterlibatan tersebut melahirkan rasa kepemilikan yang menjadi prasyarat bagi komitmen jangka panjang. Coleman (1988) menambahkan dimensi penting bahwa modal sosial yang kuat tidak dengan sendirinya menghasilkan tindakan kolektif apabila tidak disertai struktur yang mengaktifkannya, sebuah pandangan yang menjadi kerangka analitis utama dalam penelitian ini.

Meskipun penelitian tentang pengelolaan masjid dan pendekatan PAR masing-masing telah berkembang, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan keduanya dalam konteks pengelolaan kebersihan masjid di komunitas perdesaan masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian tentang masjid berfokus pada aspek tata kelola keuangan, program dakwah, atau pemberdayaan ekonomi, sementara dimensi pemeliharaan fisik dan kebersihan jarang mendapat perhatian sebagai objek kajian akademis yang mandiri. Di sisi lain, penerapan PAR dalam konteks keagamaan di Indonesia masih lebih banyak dijumpai dalam program pemberdayaan ekonomi atau pendidikan, dan belum banyak menyentuh pengelolaan fasilitas ibadah secara spesifik. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengisi celah tersebut: mengkaji secara sistematis bagaimana siklus PAR yang terdiri dari observasi, musyawarah partisipatif, aksi gotong royong, dan refleksi bersama dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk membangun sistem pengelolaan kebersihan masjid yang berkelanjutan dan berbasis pelebagaan komunitas. Penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana nilai gotong royong yang telah mengakar dalam komunitas Muslim perdesaan dapat diaktifkan kembali melalui

pendekatan yang terstruktur dan partisipatif, bukan sekadar melalui imbauan moral yang bersifat satu arah.

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan literatur tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan kebersihan Masjid Jami' Babussalam melalui pendekatan Participatory Action Research, menganalisis faktor-faktor yang mendorong partisipasi aktif Masyarakat khususnya kalangan remaja dalam kegiatan kebersihan masjid, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan yang dihasilkan dari proses partisipatif tersebut sebagai fondasi keberlanjutan program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan metodologis bagi pengembangan model pengelolaan fasilitas ibadah berbasis komunitas yang dapat diadaptasi pada konteks serupa di wilayah perdesaan lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu suatu metode penelitian yang memadukan proses pengumpulan data dengan tindakan perubahan sosial secara bersamaan. Berbeda dari penelitian konvensional yang menempatkan masyarakat sebagai objek kajian, PAR memposisikan masyarakat sebagai subjek aktif yang terlibat penuh dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan aksi, hingga refleksi dan evaluasi. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti bersifat kelembagaan dan sosial, sehingga solusi yang berkelanjutan hanya dapat lahir dari dalam komunitas itu sendiri, bukan dari intervensi pihak luar. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan paradigma kritis, di mana peneliti tidak sekadar mendeskripsi kondisi yang ada tetapi juga berperan sebagai fasilitator perubahan bersama komunitas.

Siklus PAR yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup empat tahapan yang dilaksanakan secara berurutan dan saling berkaitan, yaitu: (1) observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi awal, (2) musyawarah partisipatif untuk merencanakan tindakan bersama, (3) pelaksanaan aksi berupa kegiatan gotong royong, dan (4) refleksi bersama yang menghasilkan keputusan kelembagaan untuk keberlanjutan program. Keempat tahapan ini membentuk satu siklus PAR yang utuh dan menjadi kerangka prosedural utama penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Masjid Jami' Babussalam yang merupakan masjid umum utama di lingkungan desa tempat penelitian berlangsung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa masjid tersebut aktif digunakan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial oleh seluruh lapisan masyarakat desa, namun belum memiliki sistem pengelolaan kebersihan yang terorganisasi. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang mencakup seluruh siklus PAR dari tahap observasi awal hingga sesi refleksi dan pengambilan keputusan kelembagaan.

Subjek penelitian dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan peran mereka dalam pengelolaan masjid serta kehidupan komunitas desa. Subjek utama terdiri dari tiga informan kunci yang berpartisipasi dalam forum musyawarah, yaitu: (1) Morpin selaku Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), yang mewakili unsur pengelola dan pengurus masjid; (2) Adrian Maulana selaku Ketua NNB/Pemuda Desa, yang mewakili unsur generasi muda dan remaja masjid; dan (3) Wahyu selaku Kepala Urusan (Kaur) NNB, yang mewakili unsur teknis pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Selain ketiga informan kunci tersebut, subjek penelitian juga mencakup seluruh peserta kegiatan gotong royong yang terdiri dari pengurus BKM, anggota NNB, remaja masjid, ibu-ibu, dan

warga sekitar masjid yang hadir secara sukarela. Peneliti sendiri turut berposisi sebagai partisipan aktif dalam kegiatan, tidak hanya sebagai pengamat, sesuai dengan prinsip PAR yang mensyaratkan keterlibatan langsung peneliti dalam proses aksi.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang diterapkan secara bersamaan dan saling melengkapi. (1) Observasi partisipatif dilakukan pada tahap awal untuk mengamati kondisi fisik masjid secara menyeluruh, mencakup halaman, ruang salat lantai satu dan dua, tempat wudu, kamar mandi, serta ruang penyimpanan Al-Qur'an dan kitab-kitab keagamaan. Observasi dilanjutkan selama pelaksanaan gotong royong untuk mengamati dinamika partisipasi, inisiatif peserta, dan pola kerja yang muncul secara organik. Peneliti menggunakan lembar observasi tidak terstruktur yang memungkinkan pencatatan temuan lapangan secara fleksibel dan kontekstual. (2) Wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dilakukan dalam format musyawarah partisipatif bersama ketiga informan kunci. Peneliti berperan sebagai fasilitator diskusi, bukan sebagai pewawancara direktif. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan eksploratif, antara lain: bagaimana selama ini kebersihan masjid dikelola, siapa yang paling banyak terlibat, dan kendala apa yang selama ini dirasakan. Setiap pernyataan yang muncul dicatat secara langsung oleh peneliti, termasuk kutipan verbatim dari peserta diskusi yang dianggap signifikan secara analitis. (3) Dokumentasi dilakukan sepanjang proses penelitian, meliputi pencatatan lapangan atas kondisi fisik masjid sebelum dan sesudah kegiatan, catatan proses musyawarah, dan dokumentasi keputusan-keputusan kelembagaan yang disepakati dalam sesi refleksi bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Awal Kebersihan Masjid Jami' Babussalam

Observasi dilakukan dengan mengamati seluruh area masjid yang meliputi halaman, ruang salat lantai satu dan dua, tempat wudu, kamar mandi, serta ruang penyimpanan Al-Qur'an dan kitab-kitab keagamaan. Dari pengamatan tersebut, peneliti menemukan bahwa kondisi kebersihan masjid belum dikelola secara optimal. Pada saat observasi ditemukan sampah daun dan sampah plastik berserakan di halaman masjid yang belum dibersihkan. Kaca jendela pada kedua lantai tertutup lapisan debu yang cukup tebal sehingga mengurangi cahaya yang masuk ke dalam ruang salat. Lemari penyimpanan Al-Qur'an, kitab, dan buku-buku keagamaan berada dalam kondisi tidak tertata dan berdebu. Kondisi serupa ditemukan pada lantai dua yang juga aktif digunakan sebagai tempat salat dan kegiatan keagamaan.

Lebih dari kondisi fisiknya, peneliti mengamati bahwa belum terdapat sistem kebersihan yang berjalan: tidak ada jadwal yang tertempel di dinding, tidak ada pembagian tugas yang terlihat, dan peralatan kebersihan tidak tersimpan di tempat yang mudah diakses. Kegiatan kebersihan selama ini hanya dilakukan secara insidental, yaitu ketika ada kegiatan besar atau ketika kondisi dianggap sudah tidak dapat dibiarkan lagi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa persoalan utama bukan terletak pada rendahnya kepedulian masyarakat, melainkan pada belum adanya sistem pengelolaan yang terorganisasi.

Kondisi ini menguatkan pandangan dalam berbagai kajian tentang pengelolaan tempat ibadah bahwa fungsi masjid tidak hanya mencakup dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan kelembagaan. Ketika sistem pengelolaan tidak berjalan, kondisi fisik yang tidak terjaga adalah konsekuensi yang hampir tidak dapat dihindari, terlepas dari seberapa besar kepedulian warga secara individual. Kondisi ini juga memiliki kesamaan

dengan temuan sejumlah penelitian tentang pengelolaan fasilitas komunal di perdesaan yang secara konsisten menunjukkan bahwa persoalan kebersihan lingkungan bersama lebih sering berakar pada lemahnya struktur organisasi daripada pada rendahnya kesadaran moral warganya.

B. Identifikasi Masalah dan Perencanaan Tindakan Bersama

Berdasarkan hasil observasi tersebut, peneliti menemui Morpin selaku Ketua BKM, Adrian Maulana selaku Ketua NNB/Pemuda Desa, dan Wahyu selaku Kaur NNB dalam sebuah forum musyawarah. Peneliti memilih untuk tidak langsung memaparkan temuan atau mengajukan solusi. Ruang diskusi dibuka dengan pertanyaan sederhana: bagaimana selama ini kebersihan masjid dikelola, siapa yang paling banyak terlibat, dan kendala apa yang dirasakan.

Morpin menjadi yang pertama menyampaikan pandangannya. Ia membenarkan apa yang peneliti temukan di lapangan dan mengungkapkan akar persoalannya secara langsung. "Selama ini ya siapa sempat saja yang bersih-bersih," ujarnya. Pernyataan tersebut mengungkapkan sesuatu yang selama ini menjadi hambatan tidak terucap: bukan tidak ada yang peduli, tetapi tidak ada mekanisme yang menetapkan siapa bertanggung jawab atas apa dan kapan. Adrian Maulana kemudian menyampaikan perspektif dari sisi pemuda. Ia mengakui bahwa keterlibatan remaja dalam kegiatan masjid selama ini lebih banyak terbatas pada momen seremonial, namun ia membantah anggapan bahwa pemuda tidak peduli. "*Kalau ada jadwal jelas, anak-anak pasti ikut,*" katanya. Wahyu melengkapi diskusi dengan catatan teknis. Menurutnya, pembagian jadwal bergiliran adalah solusi paling realistis yang dapat langsung diterapkan. "*Yang paling penting peralatannya ada dan gampang diambil, jangan sampai mau bersih-bersih tapi sapunya tidak ada,*" tambahnya.

Peneliti memfasilitasi jalannya diskusi dengan mencatat setiap poin yang muncul dan mengajukan pertanyaan klarifikasi tanpa mengarahkan kesimpulan. Fakta bahwa musyawarah berlangsung tanpa konflik, seluruh peserta menyampaikan pendapat secara terbuka, dan keputusan dapat disepakati dalam waktu yang relatif singkat menunjukkan bahwa hubungan saling percaya di antara pengurus BKM, pemuda, dan masyarakat telah terbentuk sebelum penelitian ini dilaksanakan. Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan konsep modal sosial, di mana jaringan kepercayaan dan norma kolektif yang sudah tertanam dalam suatu komunitas menjadi fondasi yang memungkinkan tindakan bersama terwujud secara efektif. Hal ini mendukung pandangan yang menyatakan bahwa modal sosial yang kuat tidak dengan sendirinya menghasilkan tindakan kolektif apabila tidak disertai struktur yang mengaktifkannya (Coleman, 1988). Proses musyawarah dalam penelitian ini berfungsi tepat sebagai struktur tersebut.

Dari keseluruhan proses musyawarah, peneliti menyimpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi Masjid Jami' Babussalam adalah ketiadaan mekanisme pembagian tanggung jawab yang terorganisasi, bukan ketiadaan kepedulian dari warganya. Proses diskusi semacam ini merupakan inti dari pendekatan Participatory Action Research, di mana masyarakat diposisikan sebagai subjek yang aktif mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusinya sendiri. Hal ini mengonfirmasi prinsip yang dikemukakan Kemmis dan McTaggart (2005) bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila masyarakat dilibatkan secara penuh sejak tahap identifikasi masalah. Temuan tersebut mendukung penelitian dalam konteks pengorganisasian komunitas

berbasis masjid yang menemukan bahwa forum musyawarah partisipatif mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih kuat dan lebih dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat dibandingkan keputusan yang dirumuskan secara sepihak oleh pengurus.

C. Pelaksanaan Aksi Kolektif Berbasis Kesepakatan Partisipatif

Musyawarah tidak berhenti pada tahap bertukar pandangan. Peneliti bersama ketiga tokoh tersebut menyepakati bahwa langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah kegiatan gotong royong perdana sebagai tanda dimulainya komitmen bersama. Peneliti kemudian memfasilitasi koordinasi awal: Adrian Maulana dan Wahyu menghubungi anggota NNB dan remaja masjid, sementara Morpin mengkoordinasikan kehadiran pengurus BKM dan beberapa warga sekitar. Peneliti turut hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, tidak sebagai pengamat, melainkan sebagai bagian dari kelompok yang bekerja bersama.

Pada pelaksanaannya, area masjid dibagi menjadi beberapa zona kerja. Halaman masjid disapu dan sampah dikumpulkan untuk dibuang. Kaca-kaca jendela pada lantai satu dan lantai dua dilap satu per satu hingga bersih dari debu. Lemari penyimpanan Al-Qur'an dan kitab-kitab keagamaan dirapikan; buku-buku yang berserakan ditata kembali dan dibersihkan dari debu. Lantai dua yang selama ini kurang mendapat perhatian turut disapu dan dipel. Area tempat wudu dan kamar mandi juga dibersihkan, dengan remaja masjid mengambil peran aktif di bagian tersebut.

Peneliti mengamati bahwa pada awalnya beberapa peserta tampak menunggu arahan sebelum mulai bergerak. Namun setelah Adrian Maulana membagi tugas secara langsung, suasana berubah lebih hidup. Beberapa remaja mulai mengambil inisiatif tanpa menunggu instruksi: ada yang langsung naik ke lantai dua, ada yang mengambil alat pel, ada yang menata kitab tanpa diminta. Perubahan suasana ini tidak terjadi karena perintah dari atas, melainkan karena energi kolektif yang terbentuk ketika orang-orang bekerja berdampingan dalam satu tujuan yang sama.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi yang muncul bukan sekadar kehadiran fisik, melainkan keterlibatan aktif di mana warga turut merencanakan, melaksanakan, dan mengambil inisiatif selama proses berlangsung. Kondisi ini menguatkan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program secara signifikan lebih tinggi ketika program tersebut lahir dari proses musyawarah internal komunitas (Chambers, 1994). Selain itu, munculnya inisiatif spontan dari para remaja selama kegiatan berlangsung mengindikasikan bahwa nilai gotong royong di komunitas perdesaan tidak hilang, melainkan membutuhkan momentum dan struktur yang menggerakkannya, sebuah hal yang juga ditemukan dalam penelitian terdahulu tentang revitalisasi praktik gotong royong di komunitas berbasis keagamaan.

D. Refleksi Bersama dan Keputusan Kelembagaan

Setelah aksi gotong royong selesai, peneliti mengajak para peserta untuk melakukan refleksi bersama. Sesi ini berlangsung secara informal namun substansial. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan: apa yang terasa berbeda hari ini dibanding

biasanya, apa yang membuat lebih banyak orang mau datang, dan apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan seperti ini dapat terus berjalan.

Morpin membuka refleksi dengan pernyataan yang cukup jujur. Ia menyampaikan bahwa selama ini ia sering merasa sendirian dalam menjaga kebersihan masjid, dan kegiatan hari itu membuatnya menyadari bahwa sebenarnya banyak warga yang mau terlibat apabila ada yang mengajak dan ada kejelasan tentang apa yang perlu dilakukan. Adrian Maulana menyampaikan bahwa hari itu adalah pertama kalinya ia melihat remaja masjid terlibat dalam kegiatan kebersihan bukan karena terpaksa. "Kalau mereka tahu tugasnya apa dan kapan, mereka pasti datang," ujarnya, mengulang keyakinan yang sudah ia sampaikan sejak musyawarah. Wahyu menambahkan catatan teknis bahwa pembagian zona kerja yang dilakukan secara spontan ternyata berjalan efektif, dan mengusulkan agar pola tersebut dijadikan dasar penyusunan jadwal piket mingguan yang lebih formal.

Dari sesi refleksi inilah peneliti bersama peserta musyawarah mematangkan beberapa keputusan kelembagaan secara bersama-sama. Disepakati pembentukan Tim Kebersihan Masjid yang melibatkan pengurus BKM, pemuda, ibu-ibu, dan warga sekitar. Jadwal piket kebersihan bergiliran setiap minggu akan disusun dan ditempel di masjid agar dapat dilihat seluruh jamaah. Program Jumat Bersih ditetapkan sebagai kegiatan rutin minimal satu kali sebulan menjelang salat Jumat. Masjid akan menyediakan peralatan kebersihan yang memadai sebagai bentuk dukungan kelembagaan. Remaja masjid diberikan peran aktif dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap kegiatan kebersihan. BKM akan menyelenggarakan evaluasi rutin setiap bulan untuk meninjau pelaksanaan jadwal dan merumuskan perbaikan apabila diperlukan.

Kesepakatan pembentukan Tim Kebersihan dan mekanisme turunannya menunjukkan bahwa hasil PAR dalam penelitian ini tidak berhenti pada perubahan perilaku individual yang bersifat sesaat, tetapi mulai mengarah pada proses pelembagaan (*institutionalization*) yakni terbentuknya mekanisme organisasional yang berpotensi menjaga keberlanjutan program secara mandiri tanpa bergantung pada inisiatif satu atau dua individu tertentu (Uphoff, 1996). Pergeseran ini merupakan salah satu indikator keberhasilan yang paling relevan dalam kerangka PAR, karena pelembagaan memastikan bahwa perubahan yang dicapai tidak berhenti ketika penelitian berakhir.

Keputusan-keputusan ini tidak lahir dari rapat formal yang dipimpin peneliti, melainkan tumbuh dari percakapan reflektif setelah masyarakat mengalami sendiri proses bekerja bersama. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh tahapan PAR telah terlaksana secara berurutan: dimulai dari identifikasi masalah melalui observasi lapangan, dilanjutkan dengan perencanaan melalui musyawarah partisipatif, pelaksanaan aksi berupa kegiatan gotong royong, dan diakhiri dengan refleksi bersama yang menghasilkan keputusan-keputusan untuk keberlanjutan program. Siklus tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak berhenti pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi menghasilkan mekanisme pembelajaran bersama yang menjadi dasar bagi tindakan kolektif selanjutnya.

Pemberian peran aktif kepada remaja masjid dalam keseluruhan program perlu dipahami dalam kerangka pemberdayaan generasi muda. Ketika remaja tidak sekadar diajak hadir tetapi diberi tanggung jawab yang nyata, terjadi pergeseran posisi dari pengguna pasif menjadi penjaga aktif. Indikasi awal dari pergeseran ini terlihat selama kegiatan gotong royong, ketika beberapa remaja mengambil inisiatif tanpa menunggu instruksi, sebuah perilaku yang menurut keterangan para tokoh tidak pernah muncul

dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa rasa memiliki tidak tumbuh dari ceramah atau imbauan, melainkan dari pengalaman langsung bertanggung jawab atas sesuatu yang berarti bagi mereka. Hal ini memperluas temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelibatan pemuda dalam pengelolaan fasilitas komunal secara bermakna merupakan salah satu strategi paling efektif untuk membangun komitmen jangka panjang terhadap komunitas.

Keberhasilan penelitian ini tidak tepat jika diukur semata-mata dari bersihnya kondisi fisik masjid setelah kegiatan gotong royong. Ukuran yang lebih relevan secara ilmiah adalah sejauh mana proses ini berhasil mendorong masyarakat bergerak dari ketergantungan pada inisiatif individual yang bersifat reaktif menuju sistem tanggung jawab kolektif yang terorganisasi dan proaktif. Dari keseluruhan proses observasi, musyawarah, aksi, dan refleksi yang telah berlangsung, pergeseran tersebut telah mulai terjadi, dan fondasi kelembagaan yang dibangun melalui proses partisipatif ini menunjukkan potensi yang kuat untuk mendukung keberlanjutan program di Masjid Jami' Babussalam pada masa yang akan datang.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kebersihan Masjid Jami' Babussalam bukan bersumber dari rendahnya kesadaran warga, melainkan dari ketiadaan sistem pengelolaan yang terorganisasi. Melalui pendekatan Participatory Action Research yang dilaksanakan dalam empat tahapan dimulai dengan observasi lapangan, musyawarah partisipatif, aksi gotong royong, dan refleksi bersama, penelitian ini berhasil mendorong komunitas untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusinya secara mandiri.

Musyawarah partisipatif terbukti menjadi struktur yang mengaktifkan modal sosial yang telah ada dalam komunitas, sementara pelaksanaan gotong royong membuktikan bahwa partisipasi aktif termasuk inisiatif spontan dari kalangan remaja yang belum pernah muncul sebelumnya dapat terwujud ketika masyarakat memiliki kejelasan peran dan keterlibatan sejak tahap perencanaan. Refleksi bersama selanjutnya menghasilkan keputusan-keputusan kelembagaan yang konkret, meliputi pembentukan Tim Kebersihan Masjid, jadwal piket bergiliran, Program Jumat Bersih, dan mekanisme evaluasi bulanan oleh BKM.

Keberhasilan penelitian ini tidak diukur dari bersihnya kondisi fisik masjid semata, tetapi dari terjadinya pergeseran nyata dari pola pengelolaan yang insidental dan reaktif menuju sistem tanggung jawab kolektif yang terstruktur dan proaktif. Proses pelebagaan yang lahir dari pengalaman langsung komunitas bukan dari instruksi peneliti menunjukkan potensi keberlanjutan yang kuat dan memberikan bukti empiris bahwa perubahan kelembagaan yang bermakna dapat dimulai dari proses yang sederhana, asalkan masyarakat dilibatkan secara penuh dan kepercayaan diberikan kepada komunitas untuk menemukan serta menjalankan solusinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1994). *Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience*. World Development, 22(9), 1253–1268.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95–S120.
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., hlm. 559–603). SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Uphoff, N. (1996). *Learning from Gal Oya: Possibilities for participatory development and post-Newtonian social science*. Intermediate Technology Publications.
- Auliah, A., Prayitno, G., Ari, I. R. D., Adrianto, D. W., Subagiyo, A., Biloshkurska, N. V., & Ismaili, H. (2025). The role of community social capital and collective action in the development of sustainable tourism. *International Social Science Journal*, 75(256), 311–325. <https://doi.org/10.1111/issj.12554>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94(Supplement), S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). Participatory action research: Communicative action and the public sphere. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE handbook of qualitative research* (3rd ed., pp. 559–603). SAGE Publications.
- Samwil, S., Tjoetra, A., Yulianda, R., & Khairan, K. (2024). The systematic approach in revitalizing the role of mosques as community empowerment centers. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 4, 00022. <https://doi.org/10.29103/icospolhum.v4i.395>
- Santoso, B., Jaharudin, J., Rahman, A. A., & Triono, M. (2025). Community empowerment through the eco-mosque program at the Ali Bin Abi Tholib Mosque Sorong. *Journal of Community Service and Empowerment*, 6(1). <https://doi.org/10.22219/jcse.v6i1.36601>
- Snapp, S. S., Bezner Kerr, R., Bybee-Finley, A., Chikowo, R., Dakishoni, L., Grabowski, P., & Kanyama-Phiri, G. (2023). Participatory action research generates knowledge for Sustainable Development Goals. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 21(7), 341–349. <https://doi.org/10.1002/fee.2591>